

**PENGELOLAAN SAMPAH DI DAERAH PARIWISATA
KOTA BENGKULU
(Analisa Implementasi Peraturan Daerah / Perda Nomor 02 Tahun 2011)**

**Oleh:
Mulyadi¹**

ABSTRAKSI

Bengkulu merupakan ibukota provinsi Bengkulu yang dianugerahi dengan banyak potensi wisata yang indah yang bila dikelola dengan baik dapat bernilai ekonomis tinggi. Pemerintah telah menyadari potensi ini dan membangun fasilitas seperti proyek multi years di Pantai Panjang. Namun sayangnya seiring makin banyaknya wisatawan datang semakin banyak pula sampah yang bertebaran di daerah wisata seperti pantai Panjang. Telah ada Peraturan Daerah (Perda) No. 02 Tahun 2011 di Kota Bengkulu (khususnya di obyek wisata). Pelaksanaan Perda No. 02 tahun 2011 inilah yang menjadi fokus dan lokus pembahasan penulis. Implementasi Perda 02 /2011 seharusnya mampu menjadi solusi pengelolaan sampah dengan baik. Pengelolaan sampah di kota Bengkulu ini seharusnya dilaksanakan dengan melihat 4 (empat) aspek, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Melalui sosialisasi yang cukup seharusnya mampu membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah. Keterbatasan personil tidak akan menjadi kendala besar bila kesadaran untuk tertib mengelola sampah telah tumbuh di warga kota Bengkulu.

Kata Kunci: *Implementasi, sampah*

¹ Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu

A. Pendahuluan

Bengkulu merupakan ibukota provinsi yang dianugerahi dengan banyak potensi wisata yang indah seperti Pantai Panjang, Benteng Marlborough, Rumah Pengasingan Bung Karno, Masjid Jamik Bengkulu, Museum Negeri Bengkulu, Pantai Tapak Paderi, dan Pulau Tikus. Lokasi wisata ini letaknya sangat strategis, sehingga secara ekonomis bila dikelola dengan baik dapat menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Potensi wisata tersebut merupakan wisata sejarah dan wisata alam. Wisata alam memiliki daya pikat alamiah yang disadari oleh pemerintah daerah sehingga tertarik melakukan pembangunan yang pada mulanya untuk menambah daya tarik pantai menjadi nilai jual yang potensial sebagai obyek wisata. Proyek multi years di Pantai Panjang yang berlangsung selama kurun waktu 2007-2009 telah menghasilkan jogging track dan sport centre.

Pembangunan beberapa fasilitas publik yang bertujuan untuk memikat wisatawan lokal, nasional bahkan internasional ini sebenarnya cukup mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat di kawasan wisata ini, karena daerah ini telah menjelma menjadi pusat rekreasi utama masyarakat kota bahkan provinsi Bengkulu terutama ketika akhir pekan atau saat hari libur nasional. Kedatangan wisatawan ini merangsang Bergeraknya perekonomian dari sektor perdagangan (walaupun masih cenderung pedagang kaki lima), aktivitas hotel, café dan restoran bahkan industri rumah tangga nelayan yang mengasihkan ikan asin juga mengalami pertumbuhan.

Namun sayangnya, Bergeraknya perekonomian masyarakat di daerah wisata kota Bengkulu ternyata tidak berbanding lurus dengan keindahan obyek wisata tersebut. Semakin banyak wisatawan lokal dan nasional yang berkunjung ternyata telah merangsang pertumbuhan warung/café/pedagang namun tidak menjaga ketertiban dan keindahan obyek-obyek wisata tersebut seperti yang terjadi di sepanjang pantai panjang, tapak paderi, maupun benteng Marlborough. Kunjungan wisatawan ternyata turut menyumbang berkurangnya keindahan masing-masing obyek wisata, bagaimana tidak, pengunjung yang datang cenderung tidak memperhatikan ketertiban membuang sampah yang mereka produksi, sementara para pedagang tidak berupaya menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat

mereka mendirikan lapak atau tempat berjualan, dan celakanya lagi pemerintah seolah tidak sigap menanggapi masalah sampah yang makin hari makin merusak pemandangan sepanjang area wisata.

Pemerintah tampak melakukan pembiaran terhadap bertumbuhnya sampah di sepanjang bibir pantai. Sementara fasilitas publik berupa tong sampah sangat sulit ditemui sepanjang pantai, sehingga wajar bila pengunjung membuang sampah tanpa memperhatikan lingkungan. Padahal para pedagang/ café/ restoran/ maupun hotel yang ada di sepanjang pantai dikenai retribusi sampah yang seharusnya diimbangi dengan pelayanan dibidang pengelolaan sampah. Kemanakah peran pemerintah? Apakah pemerintah tidak melihat proses 'pengrusakan' terhadap obyek wisata yang pada awalnya dicanangkan dapat menarik wisatawan internasional? Telah ada Peraturan Daerah (Perda) No. 02 Tahun 2011 di Kota Bengkulu (khususnya di obyek wisata). Pelaksanaan Perda No. 02 tahun 2011 inilah yang menjadi fokus dan lokus pembahasan penulis.

B. Landasan Teori

Kebijakan publik secara luas menurut Robert Eystone (dalam Winarno, 2002) sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Sementara, Dye (1975) mengatakan bahwa : *Public policy is whatever government choose to do or not to do* (Kebijakan Publik adalah apapun yang diputuskan untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah).

Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah. Salah satu tahapan terpenting dalam tindakan yang diambil pemerintah tersebut adalah implementasi.

Mazmanian dan Sabatier mengatakan bahwa implementasi adalah "memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni berbagai kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Jadi, implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar,

biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi kebijakan, Wahab (2002) mengemukakan bahwa:

“faktor efektif dan tidaknya suatu implementasi kebijakan dapat dipandang dari tiga sudut pandang yaitu pertama dari pemrakarsa kebijakan/pembuat kebijakan, yaitu usaha-usaha yang dilakukan para pejabat atasan untuk mendapatkan kepatuhan dari pejabat ditingkat lebih rendah dalam merubah perilaku masyarakat/sasaran. Kedua, pejabat di lapangan dalam upaya menanggulangi gangguan yang terjadi di wilayah kerjanya yang disebabkan usaha-usaha dari pejabat di luar wilayah instansinya dan ketiga, kelompok sasaran (target group) yaitu pihak yang akan menikmati hasil dari suatu program (beneficiaries) sejauhmana pelayanan jasa yang telah diberikan dapat mengubah pola hidupnya, dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi peningkatan mutu hidup termasuk pendapatan mereka”

Edward III (1980) mengatakan implementasi kebijakan akan berhasil bila didukung oleh 4 (empat) variabel, yaitu:

1. Faktor Komunikasi

Edward menyebutkan 3 (tiga) syarat keberhasilan komunikasi yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. Menurutnya syarat pertama agar implementasi kebijakan dapat efektif adalah bahwa mereka harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan.

2. Sumber Daya

Sumber daya terdiri dari empat komponen yaitu : staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi mengenai bagaimana melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai ketaatan pelaksana, kewenangan yang cukup, fasilitas berupa dana dan sarana serta prasarana.

3. Disposisi

Jika para pelaksana memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan hal ini berarti ada dukungan terhadap implementasi, maka aparat pelaksana akan melaksanakan sesuai dengan apa yang digariskan dari awal oleh pembuat kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Jones (1996) yang menyatakan bahwa “kebijakan umum jarang berjalan swalaksana (*self-executing*). Sedangkan organisasi diperlukan agar pekerjaan dapat dilaksanakan. Organisasi dalam pemerintahan identik dengan istilah birokrasi.....”. Maka peranan dari organisasi untuk mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan adalah dominan. Adapun pengertian birokrasi yang mengacu pada tulisan Max Weber melihat birokrasi sebagai alat “untuk mengatasi kesulitan dan tuntutan tugas pemerintahan modern”.

Dalam implementasi kebijakan publik faktor yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah kepatuhan dari target grup dalam rangka menunjang keberhasilan suatu program. Faktor-faktor penyebab mengapa orang tidak mematuhi atau melaksanakan suatu kebijakan publik teramat penting untuk diketahui oleh para pembuat kebijakan (*policy maker*) maupun bagi *implemmentor*. Selanjutnya menurut Anderson (dalam Islamy, 2000) mengemukakan pendapatnya bahwa ada beberapa faktor ketidakpatuhan masyarakat dalam melaksanakan suatu kebijakan publik yaitu:

1. kebijakan bertentangan dengan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat
2. adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum ;
3. keanggotaan seseorang dalam suatu perkumpulan atau kelompok ;
4. adanya ketidakpastian hukum.

Dari uraian yang telah disampaikan diatas maka dapat ditarik keterkaitan bahwa dalam studi implementasi kebijakan publik, Peraturan Daerah No 02 Tahun 2011 adalah kebijakan publik yang dalam tahap implementasi bisa dipengaruhi berbagai faktor terutama yang berkaitan dengan komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, oleh sebab itu teori Edward III dianggap penulis cocok untuk dijadikan alat dalam menganalisa Perda tersebut.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode deskriptif yang bertujuan membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka (Nazir, 2005:55). Data yang digunakan berasal dari lokasi penelitian yaitu kota Bengkulu. Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri, dengan melihat aspek:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Distamber Kota Bengkulu dan masyarakat serta wisatawan datang ke daerah wisata di kota Bengkulu. Dalam memilih dan menentukan informan, peneliti mengacu pada perpaduan antara teknik *accidental sampling*. Teknik ini digunakan untuk menjangkau informan dari aparatur Distamber dan wisatawan ketika ditemui di lapangan. Perspektif *accidental sampling*, Sugiyono (1998:37) mengemukakan bahwa siapa saja yang bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang cocok sebagai sumber data. Data yang diperlukan akan dikumpulkan melalui beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam (*in depth interview*), observasi, dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of Analysis*) dari Miles dan Huberman (1992:15).

D. Pembahasan

Pelaksana Perda No. 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah ini adalah Walikota Bengkulu yang membawahi Dinas Pertamanan dan Kebersihan (Distamber Kota Bengkulu). Sampah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah di kota Bengkulu ini seharusnya dilaksanakan dengan melihat 4 (empat) aspek, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Aspek Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi Perda No.02/ 2011 Proses

komunikasi dalam hal ini komunikasi implementasi Perda adalah suatu penyampaian isi Perda kepada masyarakat dari stakeholder untuk dapat dilaksanakan melalui beberapa media atau cara yang tepat. Aspek komunikasi yang pertama diawali dengan sosialisasi Perda. Tanpa awal implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah adalah pengenalan kebijakan ini kepada masyarakat Kota Bengkulu melalui kegiatan sosialisasi secara eksternal maupun internal. Sosialisasi secara aktif di Kota Bengkulu dilaksanakan sejak Perda tersebut dikeluarkan oleh Walikota pada tahun 2011 melalui pembuatan papan pelarangan pembuangan sampah dan sanksi. Selain itu ada pula dokumentasi mengenai pemberitaan akan diberlakukannya Perda ini melalui media massa pada tahun 2011. Sosialisasi Perda digunakan sebagai media menerima masukan ataupun tanggapan dari masyarakat tentang pelaksanaan Perda ini, dimana warga diedukasi tentang penerapan pasal tentang denda yang diberikan Pemkot yaitu bagi warga melanggar Perda itu akan dikenai sanksi hukuman kurungan selama tiga bulan dan denda uang Rp 5 juta.

Konsep pengelolaan (management) sampah memiliki pengertian yang lebih luas dan mencakup fungsi pengawasan. Sosialisasi yang dilakukan oleh stakeholder memang pernah dilakukan ini didapat dari bukti dokumentasi di news.liputan6.com/read/.../perda-sampah-diprotes-warga-kota-bengkulu. Liputan tersebut membahas mengenai sosialisasi yang mendapat protes warga karena isi pasal yang dinilai memberatkan.

Komunikasi dapat dilakukan melalui media pertemuan-pertemuan formal maupun informal. Proses sosialisasi ini seharusnya dilakukan secara berkesinambungan melalui berbagai media. Tujuan sosialisasi ini adalah agar masyarakat yang menjadi sasaran Perda dapat mematuhi. Setelah hampir dua tahun Perda ini berlaku ternyata masih belum mampu mengatasi permasalahan bertebarannya sampah terutama di daerah wisata. Hal ini juga dimungkinkan karena wisatawan lokal maupun nasional yang datang dan singgah di beberapa daerah wisata terutama wisata alam tidak

memiliki kesadaran dan kepedulian adanya sosialisasi larangan pembuangan sampah.

Pelajar Kota Bengkulu pun menjadi target sosialisasi yaitu berupa adanya aktivitas bersih pantai yang pernah dilakukan oleh pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan pelajar Sekolah Menengah Umum (SMU). Pengelolaan sampah tidak hanya bagaimana cara agar masyarakat membuang sampah di tempatnya tapi juga upaya pengurangan sampah yaitu dengan pengurangan penggunaan alat pembungkus plastik dalam transaksi jual beli oleh pelaku usaha, penanganan sampah yang tidak hanya tanggung jawab Distamber tapi juga LPM di tiap-tiap kelurahan, cara pengangkutan, pemrosesan.

2. Sumber daya

Sumber daya dapat meliputi empat komponen menurut Edward yaitu : staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi mengenai bagaimana melaksanakan

kebijakan dan informasi mengenai ketaatan pelaksana, kewenangan yang cukup, fasilitas berupa dana dan sarana serta prasarana. Staf atau dengan kata lain adalah sumber daya manusia, yang bekerja di lingkungan organisasi (disebut personil, tenaga kerja, pekeria atau karyawan). Edward mengatakan bahwa jumlah staf yang cukup tidak berarti mendorong implementasi yang berhasil tanpa diimbangi kecakapan dari staf tersebut.

Sumber penting yang pertama adalah staf, apabila melihat dan mengartikan staf maka yang dimaksud adalah sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam Perda 11/2011 yaitu aparat Distamber Kota Bengkulu. Permasalahan yang terjadi adalah kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam Perda 02/2011. Berikut data personil Distamber yang terlibat dalam penerapan Perda ini.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Distamber Kota Bengkulu Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Pegawai Honorer
1.	76 orang	385 orang

Sumber: Distamber Kota Bengkulu, 2013

Namun tidak semuanya digerakkan untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah secara langsung, total petugas yang dikerahkan untuk membersihkan Kota Bengkulu dari sampah sebanyak 149 orang dengan 29 orang sopir dan 42 orang kru mobil. Sumber yang merupakan sumber penting yang kedua dalam implementasi adalah informasi. Informasi menurut Davis dan Olson (dalam Syafiie dkk, 1999 : 64) umumnya mendefinisikan sebagai data yang berguna bagi si penerima. Untuk informasi yang terkait dengan implementasi menurut Edward yaitu pertama, informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Pelaksana-pelaksana dalam hal ini:

- LPM
 - Pegawai Distamber Kota Bengkulu
- Mereka perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana harus melakukan. Hal ini tentunya terkait juga dengan faktor sebelumnya yaitu

komunikasi, bahwa ketidakjelasan pesan komunikasi akan menghambat keberhasilan implementasi. Bentuk kedua dari informasi adalah data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan yang berlaku. Informasi yang harus para pelaksana ketahui adalah bahwa kawasan pemukiman penduduk merupakan tanggung jawab LPM sedangkan kawasan komersil seperti daerah wisata merupakan tanggung jawab dari personil Distamber. Informasi penting lain yang juga harus masyarakat dan aparat pelaksana ketahui bahwa Perda 02/2011 tidak hanya berkaitan pembuangan sampah tapi juga:

- Upaya pengurangan pembungkus plastik pada kegiatan jual beli atau aktifitas ekonomi
- Upaya pengelolaan sampah organik menjadi pupuk atau menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis
- Cara pengangkutan sampah

d. Pemerosesan sampah, dari lain sebagainya.

Wewenang merupakan sumber ketiga yang juga penting dalam implementasi. Wewenang adalah merupakan kekuasaan resmi yang dimiliki seseorang untuk bertindak dan memerintahkan orang lain. Untuk wewenang, yang dimaksud adalah wewenang secara formal yang dimiliki oleh Distamber dan pihak ketiga yang diberi wewenang pengelolaan sampah. Sumber yang terakhir adalah fasilitas-fasilitas berupa dana dan sarana prasarana yang memadai.

3. Disposisi Sikap Aparatur

Karena keleluasaan melakukan interpretasi terhadap kebijakan, sehingga interpretasi merupakan salah satu kegiatan dari proses persepsi. Seperti apa yang disampaikan oleh Luthans (dalam Toha, 200) bahwa : "proses persepsi meliputi suatu interaksi yang sulit dari kegiatan seleksi, penyusunan dan penafsiran". Untuk diketahui bahwa persepsi menurut Krech (dalam Toha, 2001) adalah proses kognitif yang kompleks dan menghasilkan suatu gambar yang unik tentang kenyataan yang barangkali berbeda kenyataannya.

Apabila tingkah laku atau prespektif implementor berbeda dengan isi kebijakan yang sulit diterapkan maka implementasi kebijakan menjadi sulit. Sedangkan implementasi Perda 02/2011 di Bengkulu ini pelaksanaannya terdesentralisasi sehingga menjadi semakin terbukanya interpretasi terhadap isi dari Perda 02/2011, hal ini berakibat semakin sulitnya implementasi yang sesuai dengan ketentuan yang ada.

Sebab interpretasi yang bebas telah terjadi di Kota Bengkulu ketika masyarakat dalam hal ini mereka yang beraktifitas di area komersil terutama pedagang/pemilik hotel, area hiburan, maupun rumah makan/café telah membayar retribusi kebersihan, mereka menganggap tugas mereka sudah selesai, bagian kebersihan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap adanya sampah di area kegiatan ekonomis mereka. Kurangnya sosialisasi menyebabkan perbedaan persepsi antara pelaksana dan masyarakat kota Bengkulu, yang juga harus berperan aktif mengurangi limbah yang mereka hasilkan serta juga harus melaksanakan kampanye membuang

sampah di kotak yang telah disediakan dan dipilah antara sampah organik/anorganik dan sampah berbahaya.

Walaupun Perda Nomor 02/2011 ada penerapan sanksi administrasi bila ada pelanggaran yaitu : hukuman pidana ~~limbah~~ selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5 Juta, namun ternyata tidak membuat jera para pembuang sampah, masih banyak masyarakat yang membuang limbah pribadinya di sembarang tempat.

4. Struktur Birokrasi

Aspek struktur merupakan aspek yang penting sebagaimana disampaikan Jones (1996) kebijakan umum jarang berjalan swalaksana (*self – executing*). Sedangkan organisasi diperlukan agar pekerjaan dapat dilaksanakan. Organisasi dalam Pemerintah identik dengan istilah birokrasi. Maka peranan dari birokrasi untuk mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan adalah dominan. Pengelolaan sampah memang dipercayakan kepada Distamber selaku salah satu organisasi terstruktur, namun masyarakat kota juga harus menyadari perannya di luar struktur organisasi namun merupakan produsen sampah.

Implementasi Perda 02/2011 di Kota Bengkulu tentunya keterkaitan antara pihak Distamber, masyarakat dan LPM di tiap kelurahan juga sangat besar perannya. Struktur birokrasi yang jelas seharusnya mampu mempermudah jalannya penerapan hukum dan sanksi tegas terhadap pelanggaran Perda, namun karena luas wilayah kota Bengkulu, keterbatasan personil dan teknologi yang kurang mengakibatkan pelanggaran yang terjadi tidak semuanya bisa ditindaklanjuti. Alasan keterbatasan personil mengakibatkan penegakan hukuman terhadap pelanggar Perda tidak mampu menimbulkan efek jera. Sanksi kurungan maupun denda sepertinya tidak mampu membendung bertebarannya sampah di kota Bengkulu khususnya area publik yang sering dikunjungi wisatawan dalam dan luar kota.

E. Penutup

Implementasi Perda 02 /2011 seharusnya mampu menjadi solusi pengelolaan sampah dengan baik. Pengelolaan sampah di kota Bengkulu ini seharusnya dilaksanakan dengan melihat 4 (empat) aspek, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Melalui sosialisasi yang cukup seharusnya mampu membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah. Keterbatasan personil tidak akan menjadi kendala besar bila kesadaran untuk tertib mengelola sampah telah tumbuh di warga kota Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Dye, Thomas R., 1975, *Understanding Public Policy*, Prantice Hall, New Jersey.
- Edward III, George C., 1980, *Implementing Public Policy*, Congress Conal Quarterly Press, Washington DC.
- Islamy Irfan, 2000, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Publik*, Budi Aksara, Jakarta.
- Jones, Charles O., 1996, *Pengantar Kebijakan Publik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Miles, Mattew B dan Michael A Huberman, 1992, terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-metode baru*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Nazir, Moh. 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan
- Wahab, Solichin Abdul, 2002, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Budi Aksara, Jakarta.
- Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta

Sumber lain

BPS Kota Bengkulu
news.liputan6.com/read/.../perda-sampah-diprotes-warga-kota-bengkulu.
Perda No. 02 Tahun 2011